KAJIAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN DAN MANAJEMEN
PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA



2026

Kerjasama

PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

dan

PUSAT KAJIAN PARIWISATA, INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

Oktovianus, S.Hut., M.Sc.
Adam Rachmatullah, S.Par., M.Sc.
Dr. Purwanti Dyah Pramanik, M.Si.
Prof. Dr. Willy Arafah, M.M., DBA.
Hanni Adriani, S.P., M.Si.

KAJIAN EFEKTIVITAS

PENGELOLAAN DAN MANAJEMEN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

Oktovianus, S.Hut., M.Sc.
Adam Rachmatullah, S.Par., M.Sc.
Dr. Purwanti Dyah Pramanik, M.Si.
Prof. Dr. Willy Arafah, M.M., DBA.
Hanni Adriani, S.P., M.Si.

Penerbit Widina

KAJIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN MANAJEMEN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

Penulis:
Oktovianus, S.Hut., M.Sc.
Adam Rachmatullah, S.Par., M.Sc.
Dr. Purwanti Dyah Pramanik, M.Si.
Prof. Dr. Willy Arafah, M.M., DBA.
Hanni Adriani, S.P., M.Si.

Penasehat:
KH. Muhyiddin Ishaq
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta

Penanggung Jawab:
Dr. Ir. KH. Rasyidi, HY., S.H., S.H.I., M.M., M.A., CPA., C.Med.
Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan PPPIJ

Desain Cover:
Oktovianus, S.Hut., M.Sc.

Sumber Ilustrasi:
Oktovianus, S.Hut., M.Sc.

Tata Letak:
Oktovianus, S.Hut., M.Sc.

Editor:
Dr. Rina Uswatun Hasanah, S.Sos.I., M.M.
Oktovianus, S.Hut., M.Sc.

QRCBN:
62-1256-4582-963

Cetakan Pertama:
Oktober, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kajian Efektivitas Pengelolaan dan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ) dalam Mendukung Kegiatan Keagamaan di Provinsi DKI Jakarta ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya.

Kawasan Jakarta *Islamic Centre* (JIC) merupakan kawasan keagamaan strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengkajian, dakwah, pendidikan, kegiatan sosial-keagamaan, dan pengembangan masyarakat Islam perkotaan. Pengelolaan kawasan yang melibatkan lebih dari satu lembaga, yakni Unit Pengelola Kawasan (UPK) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ), menghadirkan dinamika kelembagaan tersendiri yang menuntut kejelasan kewenangan, koordinasi, serta sinergi program agar pengelolaan kawasan berjalan efektif.

Kajian ini disusun sebagai upaya untuk memahami secara objektif pola dualisme pengelolaan tersebut, mengukur efektivitas masing-masing lembaga, serta merumuskan model penguatan kelembagaan yang dapat mendukung peningkatan kualitas kegiatan keagamaan di kawasan JIC. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk menilai salah satu lembaga secara sepihak, melainkan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan konstruktif bagi perbaikan tata kelola ke depan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengelola dan pengurus Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para narasumber, responden, serta seluruh pihak yang telah memberikan data, informasi, dan masukan yang sangat berharga selama proses kajian berlangsung.

Kami menyadari bahwa laporan kajian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan kajian pada masa mendatang. Besar harapan kami, laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penguatan pengelolaan kawasan keagamaan di Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, Oktober 2026

Tim Penyusun Pusat Kajian Pariwisata
Institut Pariwisata Trisakti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Kajian 5
1.4 Manfaat Kajian 6
1.5 Ruang Lingkup Kajian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI **11**
2.1. Konsep Efektivitas Organisasi Publik 11
2.2. Teori Dualisme Kelembagaan 21
2.3. Manajemen Kawasan Berbasis Keagamaan 28
2.4. Tata Kelola Lembaga Keagamaan 36
BAB III METODE KAJIAN **47**
3.1 Pendekatan dan Jenis Kajian 47
3.2 Lokasi dan Waktu Kajian 47
3.3 Jenis dan Sumber Data 48
3.4 Responden dan Informan Kajian 48
3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 50
3.6 Teknik Analisis Data 50
3.7 Keabsahan Data dan Keterbatasan Kajian 54
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK KAJIAN **57**
4.1 Profil Kawasan Jakarta *Islamic Centre* (JIC) 57
4.2 Fasilitas dan Potensi Kawasan JIC 65
4.3 Unit Pengelola Kawasan (UPK) – Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 76
4.4 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ). 87
4.5 Landasan Hukum Dualisme Pengelolaan JIC 98

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 107
5.1 Pola Dualisme Pengelolaan Kawasan Jakarta *Islamic Centre* 107
5.2 Efektivitas UPK dalam Pengelolaan Kawasan dan Aset 128
5.3 Efektivitas PPPIJ dalam Pengelolaan Keagamaan dan Dakwah 141
5.4 Pengaruh Dualisme Pengelolaan terhadap Kualitas Kegiatan Keagamaan 153
5.5 Hambatan dan Tantangan Dualisme Pengelolaan 164
5.6 Analisis SWOT Dualisme Pengelolaan JIC 176
5.7 Model Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan JIC 191
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 205
6.1 Kesimpulan 205
6.2 Rekomendasi 209
DAFTAR PUSTAKA 217
LAMPIRAN 225
TIM PENYUSUN 246

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Komposisi Responden dan Informan Kajian 49
Tabel 3.2. Matriks Keterkaitan Rumusan Masalah, Sumber Data, dan Teknik Analisis 51
Tabel 5.1. Profil Responden Pengelola PPPIJ (Kuesioner A) dan UPK/Dinas Sosial (Kuesioner B)..... 108
Tabel 5.2. Matriks Pembagian Peran dan Kewenangan UPK dan PPPIJ di Kawasan JIC..... 110
Tabel 5.3. Perbandingan Persepsi Pengelola PPPIJ dan UPK terhadap Aspek Kewenangan, Koordinasi, dan Pengambilan Keputusan 119
Tabel 5.4. Rangkuman Titik Sinergi dan Titik Rawan Konflik Kewenangan dalam Dualisme Pengelolaan Kawasan JIC 124
Tabel 5.5. Rekapitulasi Penilaian Pengelola PPPIJ terhadap Efektivitas UPK, Diurutkan dari Indikator Tertinggi 130
Tabel 5.6. Rekapitulasi Penilaian Diri Pengelola UPK atas Pengelolaan Kawasan dan Aset 131
Tabel 5.7. Sintesis Capaian dan Kesenjangan Efektivitas UPK dalam Pengelolaan Kawasan dan Aset JIC 140
Tabel 5.8. Rekapitulasi Indikator Efektivitas Program Keagamaan dan Dakwah PPPIJ, Diurutkan dari yang Tertinggi..... 143
Tabel 5.9. Portofolio Program PPPIJ menurut Bidang Muamalah yang Dimandatkan Regulasi..... 145
Tabel 5.10. Sintesis Capaian dan Ruang Penguatan Efektivitas PPPIJ dalam Pengelolaan Keagamaan dan Dakwah..... 152
Tabel 5.11. Perbandingan Persepsi Pengelola PPPIJ dan UPK tentang Pengaruh Dualisme terhadap Kualitas Kegiatan Keagamaan..... 158
Tabel 5.12. Lima Jalur Pengaruh Dualisme Pengelolaan terhadap Kualitas Kegiatan Keagamaan di Kawasan JIC..... 163

Tabel 5.13. Rekapitulasi Hambatan Dualisme Pengelolaan menurut Pengelola PPPIJ dan UPK 171
Tabel 5.14. Taksonomi Hambatan dan Tantangan Dualisme Pengelolaan Kawasan JIC 174
Tabel 5.15. Matriks Faktor SWOT Dualisme Pengelolaan Kawasan JIC beserta Bukti Empiris 183
Tabel 5.16. Matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) Dualisme Pengelolaan Kawasan JIC 184
Tabel 5.17. Matriks EFAS (*External Factor Analysis Summary*) Dualisme Pengelolaan Kawasan JIC 186
Tabel 5.18. Matriks Strategi TOWS Pengelolaan Kawasan JIC 190
Tabel 5.19. Evaluasi Tiga Opsi Model Kelembagaan Pengelolaan Kawasan JIC 196
Tabel 5.20. Peta Jalan Transisi Menuju Badan Pengelola JIC Terpadu ber-BLUD 202
Tabel 6.1. Matriks Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Kawasan JIC 214

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Alur pelaksanaan kajian 52
Gambar 3.2. Contoh kerangka matriks SWOT/TOWS 53
Gambar 3.3. Contoh bentuk umum diagram kuadran SWOT dengan ilustrasi titik posisi organisasi 54
Gambar 5.1. Persepsi pengelola PPPIJ terhadap kejelasan pembagian kewenangan PPPIJ-UPK (Kuesioner A)..... 111
Gambar 5.2. Persepsi pengelola UPK terhadap keberadaan tumpang tindih kewenangan dalam praktik sehari-hari (Kuesioner B) 112
Gambar 5.3. Area yang paling sering menimbulkan tumpang tindih atau hambatan koordinasi menurut pengelola PPPIJ (Kuesioner A) 113
Gambar 5.4. Frekuensi koordinasi personel PPPIJ dengan UPK/Dinas Sosial (Kuesioner A) 115
Gambar 5.5. Persepsi pengelola PPPIJ terhadap pola komunikasi dan pengambilan keputusan bersama (Kuesioner A)..... 118
Gambar 5.6. Titik sinergi koordinasi UPK-PPPIJ menurut pengelola UPK/Dinas Sosial (Kuesioner B)..... 122
Gambar 5.7. Hambatan dan titik rawan dualisme pengelolaan menurut pengelola PPPIJ, persentase setuju dan sangat setuju (Kuesioner A) 123
Gambar 5.8. Mekanisme koordinasi yang paling dibutuhkan untuk memperbaiki pola dualisme menurut pengelola PPPIJ (Kuesioner A) 126
Gambar 5.9. (a) Pengalaman kebingungan jamaah atas pihak penanggung jawab layanan, dan (b) preferensi jamaah terhadap model pengelolaan JIC (pertanyaan terbuka Kuesioner C)..... 127

Gambar 5.10. Penilaian pengelola PPPIJ terhadap efektivitas layanan UPK pada sepuluh indikator pengelolaan kawasan dan aset (Kuesioner A, n = 43) 129
Gambar 5.11. Penilaian diri pengelola UPK atas pengelolaan kawasan dan aset, persentase setuju dan sangat setuju (Kuesioner B) 131
Gambar 5.12. Kesenjangan persepsi kinerja UPK antara penilaian eksternal pengelola PPPIJ dan penilaian diri pengelola UPK pada empat dimensi terpilih 133
Gambar 5.13. Persepsi kecukupan anggaran operasional dan pemeliharaan kawasan JIC menurut pengelola PPPIJ (a) dan pengelola UPK (b) 136
Gambar 5.14. (a) Prioritas peningkatan fasilitas kawasan; (b) dan bentuk dukungan UPK yang paling menentukan keberhasilan kegiatan keagamaan menurut pengelola PPPIJ (Kuesioner A) 138
Gambar 5.15. Fasilitas kawasan yang paling mendesak diperbaiki menurut jamaah, hasil kategorisasi jawaban terbuka Kuesioner C 139
Gambar 5.16. Penilaian pengelola PPPIJ terhadap efektivitas program keagamaan dan dakwah pada sebelas indikator (Kuesioner A) 143
Gambar 5.17. Penilaian pengelola UPK terhadap ketertiban penyelenggaraan kegiatan keagamaan PPPIJ (Kuesioner B) 147
Gambar 5.18. Indikator keberhasilan program keagamaan dan dakwah yang dinilai paling penting oleh pengelola PPPIJ (Kuesioner A) 150
Gambar 5.19. (a) Program yang dinilai jamaah sudah berjalan baik; dan (b) program yang paling perlu ditingkatkan (kanan), hasil kategorisasi jawaban terbuka Kuesioner C 151

Gambar 5.20. Persepsi pengelola PPPIJ tentang pengaruh dualisme pengelolaan terhadap kualitas kegiatan keagamaan (Kuesioner A) 155
Gambar 5.21. Persepsi pengelola UPK tentang pengaruh dualisme dan kondisi kawasan terhadap kualitas kegiatan keagamaan (Kuesioner B) 155
Gambar 5.22. Aspek kualitas kegiatan keagamaan yang paling terdampak oleh pola dualisme dan koordinasi UPK-PPPIJ menurut pengelola PPPIJ (kiri) dan pengelola UPK (kanan)..... 158
Gambar 5.23. (a) Persepsi jamaah tentang pengaruh kondisi fasilitas terhadap kualitas kegiatan; dan (b) hambatan yang dirasakan dalam menyampaikan keluhan (kanan), hasil kategorisasi jawaban terbuka Kuesioner C..... 161
Gambar 5.24. Perbandingan persepsi hambatan dualisme pengelolaan antara pengelola PPPIJ (Kuesioner A) dan pengelola UPK (Kuesioner B)..... 166
Gambar 5.25. (a) Prioritas hambatan yang paling mendesak diselesaikan menurut pengelola PPPIJ, dan (b) hambatan paling menentukan efektivitas menurut pengelola UPK..... 169
Gambar 5.26. Kerentanan sistemik dan tantangan eksternal pengelolaan kawasan JIC menurut data Kuesioner A dan B..... 173
Gambar 5.27. Matriks SWOT dualisme pengelolaan kawasan JIC beserta dukungan empiris setiap faktor 177
Gambar 5.28. Konsensus pengelola PPPIJ terhadap enam arah penguatan pengelolaan kawasan JIC (Kuesioner A bagian VI)..... 180
Gambar 5.29. Diagram kuadran posisi strategis dualisme pengelolaan kawasan JIC berdasarkan selisih skor IFAS (sumbu X) dan EFAS (sumbu Y) 189

Gambar 5.30. (a) Preferensi model kelembagaan pengelolaan JIC menurut pengelola PPPIJ; dan (b) model penguatan yang paling realistis jangka pendek menurut pengelola UPK 193
Gambar 5.31. Dukungan pengelola PPPIJ dan UPK terhadap opsi-opsi penataan kelembagaan JIC 194
Gambar 5.32. Skema model penguatan kelembagaan Badan Pengelola JIC Terpadu ber-BLUD 199
Gambar 5.33. Model pendanaan yang dinilai paling realistis oleh pengelola PPPIJ (Kuesioner A, P9) 200

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola lembaga publik pada era kontemporer tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai kegiatan administratif, melainkan sebagai proses pengelolaan sumber daya, kewenangan, program, aset, dan pelayanan yang harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, efektivitas tata kelola menjadi semakin penting karena lembaga publik dituntut tidak hanya menjalankan fungsi formal kelembagaan, tetapi juga mampu merespons kebutuhan masyarakat secara adaptif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas pelayanan. Hal ini berlaku pula bagi lembaga publik berbasis keagamaan yang memiliki peran strategis dalam membangun kehidupan sosial, spiritual, edukatif, dan kultural masyarakat.

Lembaga keagamaan publik memiliki karakteristik yang relatif kompleks karena berada pada pertemuan antara fungsi pelayanan publik, fungsi pembinaan umat, fungsi dakwah, fungsi pendidikan, fungsi sosial, dan fungsi pengelolaan aset. Kompleksitas tersebut menuntut adanya model manajemen yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga efektif secara substantif. Artinya, keberhasilan lembaga keagamaan publik tidak cukup diukur dari keberadaan struktur organisasi, regulasi, atau program kerja, tetapi juga dari kemampuan lembaga tersebut dalam menghadirkan layanan keagamaan yang berkualitas, terkoordinasi, berkelanjutan, dan berdampak bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1. Konsep Efektivitas Organisasi Publik

Efektivitas organisasi merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian administrasi publik, manajemen publik, dan teori organisasi karena konsep ini digunakan untuk menjelaskan sejauh mana suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan fungsi, koordinasi kelembagaan, serta penciptaan manfaat bagi pihak-pihak yang dilayani. Dalam konteks organisasi publik, efektivitas tidak dapat dipahami secara sempit sebagai keberhasilan menyelesaikan pekerjaan administratif, melainkan sebagai kemampuan organisasi dalam menghasilkan nilai publik, memberikan pelayanan yang bermutu, menjalankan mandat kelembagaan, serta merespons kebutuhan masyarakat secara akuntabel dan berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas organisasi publik berbeda dari efektivitas organisasi swasta. Organisasi privat umumnya dapat menempatkan keuntungan, produktivitas, dan daya saing pasar sebagai ukuran dominan, sedangkan organisasi publik harus mempertimbangkan mandat hukum, legitimasi sosial, kepentingan masyarakat, kualitas pelayanan, pemerataan akses, keadilan layanan, akuntabilitas, serta dampak kebijakan terhadap publik. Dalam kerangka tersebut, efektivitas organisasi publik merupakan konsep multidimensional yang tidak cukup diukur dari capaian *output* semata, tetapi juga harus dilihat dari

BAB III

METODE KAJIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) dengan desain triangulasi konvergen, yakni data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan dalam periode yang sama, dianalisis dengan tekniknya masing-masing, lalu dipertemukan pada tahap interpretasi untuk saling menguatkan dan saling mengoreksi (Creswell & Plano Clark, 2011; Creswell, 2014). Pilihan ini bukan sekadar preferensi metodologis, melainkan tuntutan objek kajiannya sendiri: efektivitas pengelolaan kawasan JIC perlu diukur lewat angka agar dapat diperbandingkan antarindikator dan antarkelompok, tetapi anatomi dualisme kelembagaan, dinamika koordinasi, dan aspirasi para pelakunya hanya dapat dipahami melalui narasi, dokumen, dan diskusi yang mendalam. Sifat kajian dengan demikian deskriptif-analitis dalam paradigma kajian kebijakan dan kelembagaan: mendeskripsikan kondisi pengelolaan sebagaimana adanya, menganalisis akar kelembagaannya, dan bermuara pada rumusan strategi penguatan, dengan kawasan JIC diperlakukan sebagai satu kasus kelembagaan yang dibedah secara utuh (Yin, 2018).

3.2 Lokasi dan Waktu Kajian

Kajian dilaksanakan di kawasan Jakarta *Islamic Centre*, Jalan Kramat Jaya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang mencakup dua entitas pengelola, yaitu Unit Pengelola Kawasan (UPK) pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Pusat

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK KAJIAN

4.1 Profil Kawasan Jakarta *Islamic Centre* (JIC)

Jakarta *Islamic Centre* atau JIC merupakan salah satu kawasan keagamaan strategis di Provinsi DKI Jakarta yang secara kelembagaan dikenal sebagai Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ). Dalam profil resmi organisasi, nama lembaga ini disebut sebagai Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, disingkat PPPIJ, atau lebih dikenal sebagai Jakarta *Islamic Centre*. Keberadaan JIC tidak dapat dipahami hanya sebagai bangunan masjid atau fasilitas keagamaan, melainkan sebagai kawasan publik berbasis keislaman yang memiliki fungsi ibadah, dakwah, pengkajian, pendidikan, sosial, budaya, pemberdayaan umat, serta pengembangan masyarakat Islam di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini menjadi penting karena JIC dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai wadah pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan bidang keagamaan Islam, sekaligus sebagai bagian dari transformasi sosial-spasial kawasan eks-lokalisasi Kramat Tunggak menjadi pusat kegiatan keagamaan yang berorientasi pada peradaban, pembinaan umat, dan pelayanan publik keagamaan.

1. Sejarah Pendirian Dan Transformasi Kawasan

Secara historis, kawasan Jakarta *Islamic Centre* berdiri di atas bekas lokasi Resosialisasi Kramat Tunggak atau Lokres Kramat Tunggak yang berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sumber resmi JIC menjelaskan bahwa lokasi tersebut sebelumnya merupakan Panti Sosial Karya

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pola Dualisme Pengelolaan Kawasan Jakarta *Islamic Centre*

Temuan pertama kajian ini menyangkut anatomi dualisme pengelolaan kawasan Jakarta *Islamic Centre* (JIC), yakni hadirnya dua entitas pengelola dalam satu kawasan yang sama: Unit Pengelola Kawasan (UPK) yang berada dalam struktur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta selaku pengampu kawasan dan aset, serta Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ) selaku lembaga *non*struktural pengelola Masjid Raya beserta program pengkajian, dakwah, dan pengembangan Islam. Dualisme tersebut bukan sekadar persoalan pembagian tugas administratif, melainkan pertemuan dua logika kelembagaan yang berbeda, yaitu logika birokrasi pemerintahan yang menekankan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan barang milik daerah dan akuntabilitas anggaran, serta logika pelayanan umat yang menekankan kelenturan, kecepatan respons, dan kemakmuran masjid. Pertemuan dua logika ini melahirkan sekaligus titik sinergi dan titik gesekan yang akan diurai dalam empat subbab berikut.

Analisis pada subbab ini bersumber dari tiga instrumen pengumpulan data. Pertama, Kuesioner A diisi oleh pengelola PPPIJ yang tersebar di Divisi Umum, Divisi Takmir, Divisi Sosial-Budaya dan Ekonomi Syariah, Divisi Pengkajian-Pendidikan, serta Divisi Komunikasi dan Penyiaran. Kedua, Kuesioner B yang diisi oleh pengelola UPK/Dinas Sosial yang membidangi ketatausahaan, sarana dan prasarana, ketertiban, pelayanan retribusi, serta pengelolaan barang milik daerah. Ketiga, Kuesioner C dijawab oleh 100 responden, yaitu jamaah, mitra,

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Kajian ini berangkat dari tiga pertanyaan pokok, yaitu: bagaimana pola dualisme pengelolaan kawasan Jakarta *Islamic Centre* (JIC) bekerja; seberapa efektif kedua pengelolanya menjalankan mandat masing-masing; dan sejauh mana keterbelahan kelembagaan itu memengaruhi kualitas kegiatan keagamaan yang dirasakan umat. Jawabannya digali dari pengelola PPPIJ (Kuesioner A), pengelola UPK/Dinas Sosial (Kuesioner B), jamaah, mitra, dan tokoh masyarakat (Kuesioner C), serta pertanyaan terbuka dari ketiganya, ditambah *focus group discussion* (FGD) yang menghadirkan pimpinan dan mantan pengelola JIC. Dari keseluruhan bukti tersebut, tiga simpulan besar dapat ditarik.

1. Simpulan Pola Dualisme Pengelolaan Kawasan JIC

Pertama, dualisme pengelolaan kawasan JIC adalah dualisme yang tertata secara normatif tetapi belum terintegrasi secara operasional. Garis demarkasinya sendiri ditarik jelas oleh regulasi pasca-2020: UPK selaku perangkat daerah menguasai "wadah", yakni kawasan, prasarana fisik, dan aset berstatus barang milik daerah, sementara PPPIJ selaku lembaga *non*-struktural menguasai "isi", yakni peribadatan, dakwah, pengkajian, dan seluruh program keumatan (Kepgub No. 567/1306 Tahun 2021; Pergub No. 29 Tahun 2021). Mayoritas pelaku di kedua lembaga mengakui kejelasan itu di atas kertas; 69,8% pengelola PPPIJ dan 83,3% pengelola UPK menilai

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, R., Arsad, S., Said, R., Hassan, A., & Shahabuddin, S. (2020). Development of framework for good governance index for mosques in Kedah. Journal of Critical Reviews, 7(19), 9343–9348.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Ayub, M. E., Muhsin, M. K., & Mardjoned, R. (1996). Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis bagi Para Pengurus. Jakarta: Gema Insani Press.

Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers and employees. Journal of Marketing, 56(2), 57–71.

Cameron, K. S. (1978). *Measuring organizational effectiveness in institutions of higher education*. Administrative Science Quarterly, 23(4), 604–632.

Campbell, H. A. (Ed.). (2013). Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds. London: Routledge.

Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The whole-of-government approach to public sector reform. Public Administration Review, 67(6), 1059–1066. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

David, F. R. (2011). Strategic Management: Concepts and Cases (13th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147–160. https://doi.org/10.2307/2095101

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. (2025). Audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta untuk membahas percepatan revitalisasi Masjid Raya JIC. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. (n.d.). Portal resmi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ekaviana, D., Mukhibad, H., & Ratih, M. (2025). Designing good mosque governance for sustainable impact. Proceedings of International Conference on Economics, Business, and Economic Education.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29.

Greenwood, R., Raynard, M., Kodeih, F., Micelotta, E. R., & Lounsbury, M. (2011). Institutional complexity and organizational responses. The Academy of Management Annals, 5(1), 317–371. https://doi.org/10.1080/19416520.2011.590299

Grigg, N. S. (1988). Infrastructure Engineering and Management. New York: John Wiley & Sons.

https://www.ohchr.org. (n.d.). About good governance. United Nations Human Rights.

https://www.ohchr.org/en/good-governance/about-good-governance. Diakses 17 Mei 2026

https://www.unescap.org. (n.d.). What is good governance?. UNESCAP. https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf. Diakses 17 Mei 2026.

Huxham, C., & Vangen, S. (2005). Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage. London: Routledge.

Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The Social Psychology of Organizations (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons.

Kementerian Dalam Negeri. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019.

Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2017). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.

Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). Evaluating Training Programs: The Four Levels (3rd ed.). San Francisco: Berrett-Koehler.

Lembaga Pendidikan Jakarta *Islamic Centre*. (n.d.). Profil Pendidikan Jakarta *Islamic Centre*. Jakarta *Islamic* Center.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340–363. https://doi.org/10.1086/226550

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Mintzberg, H. (1983). Structure in Fives: Designing Effective Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Moore, M. H. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Munir, M., & Ilaihi, W. (2006). Manajemen Dakwah. Jakarta: Kencana.
North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
OECD. (2023). *Government at a Glance 2023*. OECD Publishing.
Oliver, R. L. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions. Journal of Marketing Research, 17(4), 460–469.
Omer, S. (2014). The mosque as a community center: A concept and evolution. A.S. Noordeen.
Organization for Economic Co-operation and Development. (2025). Government at a glance 2025. OECD Publishing. doi:10.1787/0efd0bcd-en
Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Reading, MA: Addison-Wesley.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12–40.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2014). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2015). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Manajemen dan Badan Pembina Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2020). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2021). Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2021). Keputusan Gubernur Nomor 1306 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2021). Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. JDIH Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. JDIH Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2025). Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 302 Tahun 2025 tentang Pengelola Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Masa Tugas Tahun 2025–2027.

Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perpustakaan Jakarta *Islamic Centre*. (n.d.). Koleksi Perpustakaan. Perpustakaan Jakarta *Islamic* Center.

Peters, B. G. (1998). Managing horizontal government: The politics of coordination. Canadian Center for Management Development.

Peters, B. G. (2018). The challenge of policy coordination. Policy Design and Practice, 1(1), 1–11.

Pondy, L. R. (1967). Organizational conflict: Concepts and models. Administrative Science Quarterly, 12(2), 296–320.

Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(2), 229–252. https://doi.org/10.1093/jopart/mum015

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta & Institut Pariwisata Trisakti. (2026). Notulen FGD Riset Sosial Keagamaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta *Islamic Centre*), The Alana Hotel Sentul, 6-8 Mei 2026.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. (2022). Kiai Subki memastikan kegiatan di Jakarta *Islamic Centre* tetap berjalan. Jakarta *Islamic* Center.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. (2022). Terbakarnya Kubah JIC, PPPIJ tegaskan tak ada korban jiwa. Jakarta *Islamic* Center.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. (2023). Profil Organisasi Jakarta *Islamic Centre*. Diakses dari https://*islamic*-center.or.id/profil-organisasi/.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. (2025). Gubernur Pramono Anung melantik pengelola Masjid Raya PPPIJ. Jakarta *Islamic* Center.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. (2025). Gubernur DKI Pramono Anung menerima audiensi dari pengurus PPPIJ dan menegaskan komitmennya untuk membangun kembali Masjid Raya JIC. Jakarta *Islamic* Center.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. (2025). Pengurus JIC: Susunan Pengelola Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Masa Tugas 2025–2027.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. (2025). Revitalisasi Masjid Raya Jakarta *Islamic Centre* menuju titik terang. Jakarta *Islamic* Center.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. (2025). Wagub DKI salat Jumat dan meninjau dampak kebakaran di Masjid JIC. Jakarta *Islamic* Center.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. (n.d.). Gedung Bisnis. Jakarta *Islamic* Center.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. (n.d.). Gedung Sosial Budaya. Jakarta *Islamic* Center.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. (n.d.). Masjid. Jakarta *Islamic* Center.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. (n.d.). Profil organisasi Jakarta *Islamic Centre*.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. (n.d.). Sejarah berdirinya Jakarta *Islamic Centre*.

Quinn, R. E., & Rohrbaugh, J. (1983). *A spatial model of effectiveness criteria: Towards a competing values approach to organizational analysis*. Management Science, 29**(**3), 363–377.

Radwan, A. H. (2021). The mosque as a public space in the *Islamic* city: An analytical study of architectural urban design of contemporary examples. Journal of Architecture, Arts and Humanistic Science.

Rahim, M. A. (2002). Toward a theory of managing organizational conflict. International Journal of Conflict Management, 13(3), 206–235.

Rangkuti, F. (2014). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Siregar, D. D. (2004). Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Steers, R. M. (1975). *Problems in measuring organizational effectiveness*. Administrative Science Quarterly, 20(4), 546–558. doi:10.2307/2392022.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Thompson, J. D. (1967). Organizations in Action: Social Science Bases of Administrative Theory. New York: McGraw-Hill.

Thornton, P. H., Ocasio, W., & Lounsbury, M. (2012). The institutional logics perspective: A new approach to culture, structure, and process. Oxford University Press.

United Nations Development Program. (1997). Governance for sustainable human development: A UNDP policy document. UNDP.

Usman, I. (2020). Revitalizing the role and function of the mosque as a center for da'wah activities and community development. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 4(1), 1–24.

W.K. Kellogg Foundation. (2004). Logic Model Development Guide. Battle Creek, MI: W.K. Kellogg Foundation.

Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix: A tool for situational analysis. Long Range Planning, 15(2), 54–66.

Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability (13th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

World Bank. (2026). *Worldwide Governance Indicators*.

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Yuchtman, E., & Seashore, S. E. (1967). *A system resource approach to organizational effectiveness*. American Sociological Review, 32(6), 891–903. doi:10.2307/2092843.

TIM PENYUSUN

Oktovianus, S.Hut., M.Sc.



Penulis dilahirkan di Makale (Tana Toraja), 27 Oktober 1980. Pada tahun 2003, menyelesaikan pendidikan Diploma 3 pada Program Studi Ekowisata, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya, pada tahun 2014 menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) di Program Studi Konservasi Biodiversitas Tropika, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor yang diselesaikan pada tahun 2018. Saat ini menjadi Dosen (Tenaga Pengajar, Pendidik dan Peneliti) Program Studi S1 Pariwisata sejak Tahun 2022 serta ditugaskan menjadi Tenaga Ahli di Pusat Kajian Pariwisata (PUSKAP) Institut Pariwisata Trisakti hingga sekarang.

Latar belakang pengalaman di antaranya pernah menjadi ketua tim survei potensi ekowisata di areal IUPHHK PT. Agatis Alam Indonesia dan Pegunungan Muller, Provinsi Kalimantan Tengah (PT. Agatis Alam Indonesia – Fakultas Kehutanan IPB) tahun 2012; Tenaga ahli Penyusunan Dokumen Studi Potensi Ekowisata di Kawasan TN Gunung Leuser (TFCA Sumatera-STP Trisakti) dan Penyusunan Dokumen Studi Potensi Ekowisata dan Rencana Pengembangan Ekowisata di Kawasan Taman Nasional Siberut (TFCA Sumatera-STP Trisakti) tahun 2018, Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan dan Pengusahaan Ekowisata Pendidikan Puslitbang Perhutani Cepu (Puslitbang Perhutani Cepu) tahun 2018; Tenaga Ahli *Drone* dalam Penyusunan Dokumen DED Taman Wisata Alam Lejja PERUSDA Soppeng tahun 2021; Tenaga Ahli dalam penyusunan Dokumen dan Peta Pohon Kawasan IUPSWA Perusda Kabupaten Soppeng di Blok Pemanfaatan TWA Lejja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan

tahun 2022; dan peneliti dalam Penyusunan Dokumen Kesediaan Membayar/*Willingness to Pay* (WTP) Tarif Masuk Kawasan Wisata IUPSWA Perusda Kabupaten Soppeng, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Pada tahun 2023, menjadi tenaga ahli untuk menyusun *Feasibility Study* & Analisis Potensi Bisnis Strategis Pemandian Ompo, Pemandian Citta, dan Pasar Sentral Kabupaten Soppeng bagi Perusda Soppeng. Selanjutnya, pernah menjadi Tenaga Ahli pada Kajian Pengembangan MICE DKI Jakarta di Disparekraf Provinsi DKI Jakarta. Kemudian menjadi TA Tourism Project "Analisis Kepuasan Berwisata Pengunjung Taman Mini Indonesia Indah Pasca Revitalisasi" dari PT. TWC & PT Bhumi Visatanda Indonesia. Menjadi Tenaga Ahli untuk kajian "*Geopark Development Project: Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Geopark Product di Geopark Bayah Dome, Kabupaten Lebak, Banten" (pekerjaan dari Bapelitbangda Kabupaten* Lebak) pada tahun 2024. Kemudian, pada tahun 2024 menjadi Tenaga Ahli dalam *Ecotourism and Wildlife Evaluation Project* berjudul "Analisis dampak pembangunan fasilitas wisata pada tahun 2022 dan 2023 terhadap ekologi satwa liar di Kawasan IUPSWA PT. Lamataesso Mattappa Perusda Kabupaten Soppeng yang berada pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja, serta pekerjaan *Ecotourism Evaluation Project* "Evaluasi Rentang Persepsi dan Kepuasan Pengunjung TWA Lejja atas Berbagai Peningkatan Fasilitas Wisata di Kawasan IUPSWA PT. Lamataesso Mattappa, Perusda Soppeng TWA Lejja, Kabupaten Soppeng". Pada tahun 2024, kembali menjadi Tenaga Ahli *Tourism Development Project* dengan judul "Pengembangan Daya Tarik Wisata Baru Kawasan Pasar Hexagon", yang merupakan pekerjaan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah Khusus Jakarta. Pada tahun 2025, menjadi Tenaga Ahli untuk beberapa kajian, di antaranya: Kajian forum bisnis ketenagakerjaan usaha pariwisata Provinsi DKI Jakarta; Naskah akademik peraturan daerah tentang kepariwisataan Provinsi DKI Jakarta; Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta; serta Kajian pengembangan pariwisata regeneratif di destinasi wisata Kepulauan Seribu, Jakarta.

Adam Rachmatullah, S.Par., M.Sc.



Penulis dilahirkan di Bandung, 21 Agustus 1990. Pada tahun 2011, menyelesaikan pendidikan Diploma 3 pada Program Studi Usaha Perjalanan Wisata di Universitas Padjadjaran (UNPAD), dan kemudian pada tahun 2011-2012 menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Manajemen *Resort and Leisure* di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Pada tahun 2013, melanjutkan pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Institut Pertanian Bogor. Saat ini menjadi dosen (tenaga pengajar, pendidik, dan peneliti) serta ditugaskan sebagai tenaga ahli di Pusat Kajian Pariwisata (PUSKAP) Institut Pariwisata Trisakti. Adapun saat ini sedang menempuh studi doktor pada Program Studi Konservasi Biodiversitas Tropika dengan Konsentrasi Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan di UPB University.

Latar belakang pengalaman di antaranya pernah menjadi *Tourism Analyst* untuk penyusunan *site design Elephant Conservation Center* di Taman Nasional Way Kambas. Penulis juga memiliki pengalaman sebagai Tenaga Ahli dalam penyusunan studi potensi ekowisata, serta *Development Coordinator* dalam *Ecotourism Development Planning* di Kawasan Desa Penyangga Taman Nasional Siberut (2019-2021), yang merupakan proyek kerja sama antara STP Trisakti, TFCA, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, beberapa pengalaman penulis dalam penyusunan Perencanaan Pariwisata tahun 2018-2020 mencakup Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam (RPPA), *Site Plan*, dan Desain Fisik di sejumlah wilayah TN dan TWA, antara lain: (1) PT. Panorama Menjangan Bali di TN Bali Barat; (2) PT. Kintamani Ekspose Nusantara di TWA Panelokan; (3) PT. Batur Kintamani Asri di TWA Panelokan; (4) Perusda Soppeng di TWA Lejja; (5) PT. Bocimi Halimun Salak di TN Halimun Salak; (6) PT. Gajah Makmur Bersama di TN Way Kambas; (7) PT. Cibodas Puncak Nirwana di TN Gunung Gede Pangrango; (8) PT. Smaga Meru Lestari di TN Gunung Merbabu; (9) PT. Rinjani Panorama Elok di TN Gunung Rinjani; (10) PT. Pulau Impian Milenia di TWAL 17 Pulau Riung; (11) PT. Panorama Danau Bali di

Danau Buyan Tamblingan Bali; (12) PT. Panorama Danau Bali di Danau Biyan, Tamblingan, Bali. Pada tahun 2023 menjadi tenaga ahli untuk menyusun *Feasibility Study* & Analisis Potensi Bisnis Strategis Pemandian Ompo, Pemandian Citta, dan Pasar Sentral Kabupaten Soppeng bagi Perusda Soppeng; (13) Pada 2023 menjadi Tenaga Ahli pada Kajian Pengembangan MICE DKI Jakarta dari pekerjaan Disparekraf Provinsi DKI Jakarta; (14) Menjadi Tenaga Ahli Tourism Project "Analisis Kepuasan Berwisata Pengunjung Taman Mini Indonesia Indah Pasca Revitalisasi*"* dari PT. TWC & PT Bhumi Visatanda Indonesia; (15) Menjadi Tenaga Ahli untuk kajian "*Geopark Development Project* "Pengembangan Ekonomi Lokal melalui *Geopark Product'* di Geopark Bayah Dome, Kabupaten Lebak, Banten" (pekerjaan dari Bapelitbangda Kabupaten Lebak) pada tahun 2024; (16) Menjadi Tenaga Ahli dalam pekerjaan *Ecotourism and Wildlife Evaluation Project* berjudul "Analisis dampak pembangunan fasilitas wisata pada tahun 2022 dan 2023 terhadap Ekologi Satwa Liar di Kawasan IUPSWA PT. Lamataesso Mattappa Perusda Kabupaten Soppeng yang berada pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja"; (17) Tenaga Ahli dalam *Ecotourism Evaluation Project* "Evaluasi Rentang Persepsi dan Kepuasan Pengunjung TWA Lejja atas Berbagai Peningkatan Fasilitas Wisata di Kawasan IUPSWA PT. Lamataesso Mattappa, Perusda Soppeng TWA Lejja, Kabupaten Soppeng"; 18). Menjadi TA *Tourism Development Project* dengan judul "Pengembangan Daya Tarik Wisata Baru Kawasan Pasar Hexagon", yang merupakan pekerjaan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah Khusus Jakarta. Pada tahun 2025, menjadi Tenaga Ahli untuk beberapa kajian, di antaranya: Kajian forum bisnis ketenagakerjaan usaha pariwisata Provinsi DKI Jakarta; Naskah akademik peraturan daerah tentang kepariwisataan Provinsi DKI Jakarta; Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta; serta Kajian pengembangan pariwisata regeneratif di destinasi wisata Kepulauan Seribu, Jakarta.

Dr. Purwanti Dyah Pramanik, M.Si.



Penulis lahir di Sukabumi pada 21 Mei 1964. Lulus S2 Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Indonesia serta menyelesaikan Program Doktoral di Institut Pariwisata Trisakti.

Beberapa publikasi ilmiah terbaru antara lain:

1. Purwanti Dyah Pramanik, Dino, Santi, Achmadi, & Hanny. (2022). *The Moderating Role of Feedback on the Effect of Goal-Setting Participation on Innovative Work Behavior*. *Asia-Pacific Management and Business Application*, vol.11(2), 221-232.
2. Purwanti Dyah Pramanik, Santi Maudiarti, Mochamad Achmadi, Hanni Adriani. (2022). *Exploring A Sustainable Homestay: A Qualitative Study of Owner's Participation*. *Tourism Research Journal*, vol.6(1), 20-38.
3. *Paper Presenter at IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 145 (2018), *Scopus Indexed*.
4. *Paper Presenter at ASEAN Tourism Research Forum – James Cook University in Singapore*, 2017.

Prestasi yang pernah diraih antara lain: (1) Penerima Hibah KemenristekDikti Skema IbM (Iptek Bagi Masyarakat), dengan judul "*Anti Pollution Surabi*" pada tahun 2015; (2) Penerima Hibah Penelitian KemenristekDikti pada tahun 2016, 2025, dan 2026; dan (3) The Best Paper pada Tourism, *Gastronomy, and Destination International Conference* 2023 di Malaysia, dan 2025 di Bali.

Adapun pengalaman praktis di dunia kerja adalah: (1) *Associate professor* di Institut Pariwisata Trisakti, 2021-sekarang; (2) Asesor Beban Kerja Dosen KemenristekDikti, 2021-sekarang; (3) Komisaris PT. Expertindo Muliasistema, 1996-*present*; (4) *Deputy Training Manager*, PT. Bank Mandiri (*Ex-legacy* PT. Bank Dagang Negara), 1990-1999; dan (4) *Training Coordinator*, PT. Hotel Indonesia International, Hotel Wisata International Unit, 1988-1990.

Pada 2023-2024, terlibat aktif dalam kajian: (1) Kepuasan Berwisata Pengunjung Taman Mini Indonesia Indah Pasca Revitalisasi; (2) Pengembangan *Eco-Product Geopark* Bayah Dome (Bappeda Kab. Lebak); (3) Pengembangan DTW Kawasan Pasar Hexagon (Disparekraf DKI Jakarta); (4) Evaluasi Manfaat-Dampak Bantuan Sarana Prasarana Desa Wisata di Indonesia. Pada tahun 2025, terlibat aktif dalam kajian: (1) Pengembangan Pariwisata Regeneratif Kepulauan Seribu; (2) Forum Bisnis Ketenagakerjaan Usaha Pariwisata; (3) Penyusunan naskah akademik tentang Peraturan Daerah (PERDA) Kepariwisataan Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2026, terlibat aktif dalam kajian: (1) Pengembangan Pulau Tidung Kecil sebagai Destinasi Wisata Tematik Kucing di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta; dan (2) Implementasi Pariwisata Regeneratif pada Destinasi Pariwisata.

Prof. Dr. Willy Arafah, M.M., DBA.



Penulis lahir di Curup, Bengkulu, pada 18 Februari 1971. Pada tahun 1994, menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti. Di universitas yang sama, pada tahun 1996 menyelesaikan pendidikan S2. Kemudian, pada tahun 2006, menyelesaikan pendidikan S3 (doktoral) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai Doktor Manajemen Pendidikan. Selanjutnya, pada tahun 2009 juga menyelesaikan pendidikan doktoral (S3) sebagai Doktor Manajemen Bisnis dan Stratejik di San Beda *Graduate School of Business*, Manila, Filipina. Saat ini menjadi: 1) Dosen Tetap A pada Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti; 2) Asisten Direktur II Bidang Administrasi dan Keuangan pada PPS serta Sekretaris Program pada Program Doktor Ilmu Ekonomi; 3) Mengelola Yayasan Jabbal Arafah, Yayasan Usaha Umat (YBUU), Yayasan Pemberdayaan Ekonomi Tawhid Indonesia (YPETI), dan Yayasan Alamatama Bawono Loka; dan 4) Penguji Fit & *Proper Test* Industri Keuangan *Non*bank pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, pernah menjadi konsultan pada beberapa kementerian seperti Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan UKM; BPK; Pemerintah Daerah; Pekerjaan Umum; Pertamina; PT. Patra Jasa dan SKK Migas.

Organisasi yang diikuti sampai sekarang yaitu: (1) Ikatan Doktor Indonesia; (2) Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia; dan (3) Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu. Beberapa sertifikasi yang dimiliki yaitu: (1) *Certified Management*, USA, 2017; dan (2) *Certified Consumer Behaviour*, USA, 2018. Kemudian, beberapa buku yang pernah ditulis yaitu: (1) Esensi Lingkungan Bisnis & *Entrepreneurship* (Willy Arafah, 2010); (2) Kepemimpinan dalam Perspektif Islam (Yuswar Z. Basri, Willy Arafah, 2015); dan (3) Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik (Veithzal Rivai, Mansur Ramli, Thoby Mutis, dan Willy Arafah).

Pada 2023-2024, terlibat aktif dalam kajian: (1) Kepuasan Berwisata Pengunjung Taman Mini Indonesia Indah Pasca Revitalisasi; (2) Pengembangan *Eco-Product Geopark* Bayah Dome (Bappeda Kab.

Lebak); (3) Pengembangan DTW Kawasan Pasar Hexagon (Disparekraf DKI Jakarta); (4) Evaluasi Manfaat-Dampak Bantuan Sarana Prasarana Desa Wisata di Indonesia. Pada tahun 2025, terlibat aktif dalam kajian: (1) Pengembangan Pariwisata Regeneratif Kepulauan Seribu; (2) Forum Bisnis Ketenagakerjaan Usaha Pariwisata; (3) Penyusunan naskah akademik tentang Peraturan Daerah (PERDA) Kepariwisataan Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2026, terlibat aktif dalam kajian: (1) Pengembangan Pulau Tidung Kecil sebagai Destinasi Wisata Tematik Kucing di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta; dan (2) Implementasi Pariwisata Regeneratif pada Destinasi Pariwisata.

Hanni Adriani, S.P., M.Si.



Penulis dilahirkan di Sukabumi, pada 16 November 1987. Pada tahun 2011, menyelesaikan program sarjana S1 Program Studi Arsitektur Lanskap di Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, IPB University, kemudian pada tahun 2016, menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Studi Arsitektur Lanskap di Sekolah Pascasarjana, IPB University. Saat ini merupakan dosen di Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Institut Pariwisata Trisakti sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Aktif tergabung dalam Asosiasi Profesi nasional dan internasional, seperti anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), anggota Ikatan Arsitek lanskap Indonesia (IALI), pengurus *Indonesia Adventure Travel Trade Association* (IATTA), dan sebagai Representatif Indonesia di *Asian Cultural Landscape Association* (ACLA).

Pengalaman Profesional *project* yang pernah dilakukan diantaranya yaitu:

1. Ahli Perencanaan Destinasi Wisata pada Pekerjaan Perencanaan Destinasi Wisata Kampung Tugu Jakarta Utara pada tahun 2022.
2. Ahli Perencana Lanskap Wisata pada Pekerjaan Grand Design Pengembangan Kawasan Ekowisata Sungsang Kabupaten Banyuasin 2020-2070 di tahun 2020.
3. *Landscape Coordinator* di Pekerjaan Pemeliharaan/Perawatan Taman dan Halaman di Istana Kepresidenan Jakarta selama satu tahun pada tahun 2020.
4. Ahli Arsitek Lanskap dalam Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Mifan, PDIKM, dan Rest Area Silaing Bawah, Kota Padang Panjang. Kerja sama Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. LICO di tahun 2019.
5. Tenaga ahli Penyusunan Dokumen Studi Potensi Ekowisata di Kawasan TN Gunung Leuser (TFCA Sumatera-STP Trisakti) pada Tahun 2018.

6. Ahli Arsitek Lanskap dalam Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa): Penyusunan Rancang Lansekap Tujuh Kelurahan Peserta Lomba Inovasi Rancang Kampung Tematik. Kerja sama PT. Anggada Karsa Utama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2018.
7. Ahli Arsitek Lanskap dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman di Jl. Abdul Rachman, RW 014, Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kerja Sama Bidang Pertamanan, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dengan PT. Hardja Moekti *Consultant* pada tahun 2017.
8. Ahli Arsitek Lanskap dalam kegiatan Pemetaan Dinamika Lingkungan Perairan dan Potensi Sumberdaya Ikan di Kawasan Konservasi Nasional, Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu (Region Timur dan Region Sumba-Flores), Nusa Tenggara Timur, kerja sama Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB, pada tahun 2016.
9. Arsitek Lanskap (Asisten Tenaga Ahli) dalam Penyusunan Masterplan *Landscape* Pusat Perkantoran, Kabupaten Mahakam Ulu, Kerja Sama Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu dengan P4W LPPM IPB, pada tahun 2015.

Kawasan Jakarta *Islamic Centre* (JIC) menyimpan satu paradoks tata kelola: satu kawasan, dua pengelola. Unit Pengelola Kawasan (UPK) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memegang "wadah" berupa kawasan, prasarana fisik, dan aset milik daerah, sedangkan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ) memegang "isi" yaitu peribadatan, dakwah, pengkajian, dan seluruh program keumatan. Buku ini memotret dualisme tersebut secara utuh dan menempatkannya sebagai persoalan kelembagaan, bukan persoalan orang.

Telaah disusun dari suara para pelaku langsung: pengelola PPPIJ lintas divisi, personel inti UPK dan Dinas Sosial, serta jamaah, mitra, dan tokoh masyarakat. Suara itu diperkaya diskusi terpumpun bersama pimpinan PPPIJ, mantan Kepala Sekretariat periode 2015-2022, dan narasumber LPPOM MUI DKI Jakarta, ditambah penelusuran regulasi dan pengamatan lapangan.

Gambarannya tajam. Pembagian kewenangan diakui jelas di atas kertas, namun hanya sebagian kecil keputusan di lapangan yang benar-benar bebas dari tumpang tindih; gesekan paling terasa pada penggunaan ruang dan pemeliharaan sarana. Program keagamaan PPPIJ melaju kuat, sementara wadahnya menua, gedung utama belum direhabilitasi sejak kebakaran 2022 dan kecukupan anggaran menjadi titik terlemah bagi kedua belah pihak. Jiwa kawasan ini sehat; raganya yang memerlukan perawatan.

Dari pemetaan posisi strategis, aspirasi pemangku kepentingan, dan penimbangan tiga opsi kelembagaan secara terbuka, buku ini menawarkan satu jalan tengah yang tertimbang: Badan Pengelola JIC Terpadu berpola keuangan BLUD, yaitu satu badan, satu komando, dua deputi, dengan kendali visi pada Dewan Pengarah, keleluasaan keuangan berpagar tegas, dan layanan satu pintu. Peta jalan tiga tahap serta pengelolaan risikonya diuraikan hingga tataran agenda kerja.

Bacaan bagi pengambil kebijakan daerah, pengelola kawasan keagamaan dan akademisi tata kelola, bahwa hati sebuah masjid dan otak sebuah korporasi modern dapat berada dalam satu tubuh.

Kerjasama

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Jakarta Islamic Centre, Jakarta

Pusat Kajian Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti, Jakarta

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

QRCBN : 62-1258-4582-963